



EFEKTIFITAS PADA KEBIJAKAN SISTEM MONETER DI DALAM ISLAM

Shalwa Herdiana Meydina

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Ahmad Sya'bani

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Nurul Aini Maulida

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Alamat: Jl. Raya Bogor KM.23 No.99, Kampus FEB UHAMKA

Korespondensi penulis: 2102025079@uhamka.ac.id

Abstrak. *The purpose of monetary policy is to achieve and maintain the stability of the rupiah value. The purpose of this journal is to find out monetary policy in an Islamic perspective. This is interesting to discuss because there are fundamental differences between conventional monetary policy and monetary policy in the perspective of Islamic economics. The transmission mechanism of conventional monetary policy can be seen from the total credit of conventional banks, the interest rate of Bank Indonesia Certificates, and the average yield of Government Securities. While Islamic monetary policy is seen from the rate of return on Sharia Bank Indonesia Certificates, total Islamic bank financing and the average yield on State Sharia Securities. Unlike the effectiveness as measured by Impulse Response Function and Forecast Error Variance Decomposition, where conventional monetary policy is faster in controlling the inflation rate compared to Islamic monetary policy. This research uses library research method. This scientific research is conducted to see the effect and how the effectiveness of monetary policy transmission mechanisms from both conventional and sharia perspectives to overcome inflation in 2013-2020.*

Keywords: *Conventional Monetary Policy; Inflation; Monetary Policy; Sharia Monetary Policy.*

Abstrak. *Tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tujuan jurnal ini yaitu mengetahui kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Hal ini menarik untuk dibahas karena ada perbedaan mendasar antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional dapat dilihat dari total kredit bank konvensional, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan rata-rata imbal hasil Surat Utang Negara. Sedangkan kebijakan moneter syariah dilihat dari tingkat imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah, total pembiayaan bank syariah dan rata-rata imbal hasil Surat Berharga Syariah Negara. Berbeda halnya dengan efektivitas sebagai diukur dengan Impulse Response Function dan Forecast Error Variance Decomposition, dimana kebijakan moneter konvensional lebih cepat dalam mengendalikan laju inflasi dibandingkan dengan kebijakan moneter syariah. Penelitian ini menggunakan metode library research. Penelitian ilmiah ini dilakukan untuk melihat pengaruh dan bagaimana efektivitas kebijakan moneter mekanisme transmisi baik dari perspektif konvensional maupun syariah untuk mengatasi inflasi tahun 2013-2020.*

Kata Kunci: *Inflasi; Kebijakan Moneter; Kebijakan Moneter Konvensional; Kebijakan Moneter Syariah.*

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter adalah hal terpenting yang terkendali ekonomi Nasional. Namun terdapat perbedaan pada sistem perekonomian yang berlaku menyebabkan perbedaan pendapat mengenai kebijakan moneter. Sistem ekonom pendekatan tradisional terhadap kebijakan moneter

berbeda dari sistem ekonomi Islam. Sistem moneter Islam adalah sistem ekonomi Islam yang mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui uang Islam, antara lain terwujudnya keadilan dan keuntungan. *Maqashid Syariah* melindungi keadilan (*Iqamah al' Adl*) atau penerapan keadilan dalam segala bidang kehidupan manusia dan menghasilkan keuntungan (*jalb al maslahah*), yaitu menghasilkan keuntungan terutama untuk pihak-pihak tertentu. Penyelarasan sektor-sektor ekonomi moneter mempengaruhi seluruh sektor perekonomian. Meningkatnya pembiayaan perbankan syariah berdampak pada keseimbangan perekonomian yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan. Terlihat bahwa instrumen keuangan syariah dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan umum terhadap perbankan syariah.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mengendalikan kondisi makroekonomi agar dapat berfungsi sesuai keinginan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini bertujuan untuk menjamin stabilitas terhadap inflasi dan pertumbuhan produksi yang seimbang. Hampir semua sektor perekonomian saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sektor keuangan berkembang lebih cepat dibandingkan sektor riil. Hal ini disebabkan oleh sektor keuangan lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor riil.

Inflasi

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal ini yang menyebabkan uang selalu menjadi standar untuk pembayaran yang tertunda atau alat tukar menukar. Inflasi menyebabkan oranglain tidak berlaku adil terhadap orang lain, meskipun banyak orang tidak sadar sudah melakukan hal tersebut. Dengan hal ini dapat merusak efisiensi sistem moneter dan menimbulkan ongkos kesejahteraan pada masyarakat. Implasi memperburuk iklim ketidakpastian dimana keputusan-keputusan ekonomi diambil, yang menimbulkan banyak kekhawatiran pada modal dan menyebabkan pengalokasian yang gagal.

Uang Menurut Ekonomi Islam

Masyarakat tidak bisa melakukan segalanya sendirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada kebutuhan yang diciptakan oleh orang lain, dan untuk mencapainya, seseorang harus mengubahnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi tidak praktis bagi seseorang untuk menunggu atau mencari seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, karena ia mempunyai barang atau jasa yang diperlukan dan pada saat yang sama membutuhkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya lain yang berperan sebagai media dan unit nilai untuk menyelesaikan transaksi. Jauh sebelum Barat menggunakan uang untuk segala transaksi, dunia Islam telah mengetahui tentang alat tukar dan pengukuran nilai tersebut, bahkan Al-Qur'an secara khusus menyebutkan emas dan perak sebagai alat ukur nilai dalam berbagai ayat. Para ahli hukum menafsirkan emas dan perak sebagai dinar dan dirham.

Ekonomi Islam membuat perbedaan yang jelas antara uang dan modal. Dalam Islam, uang adalah barang publik/komunitas, sehingga menimbun uang (atau membiarkan uang menjadi tidak menguntungkan) diperlukan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Akibatnya, proses pertukaran ekonomi terhambat. Selain itu, penimbunan uang atau harta juga dapat mendorong manusia untuk melakukan hal-hal buruk seperti keserakahan, ketamakan, dan kemalasan bersedekah (Zakat, Infak, Sadaqah). Kondisi buruk tersebut berdampak negatif terhadap kelangsungan perekonomian. (Latifah, 2015)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kajian pustaka atau studi kepustakaan yang berisi teori-teori yang bersangkutan dengan masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan atau *library research*, merupakan penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data dari sumber buku terkait dan karya tulis ilmiah dengan tujuan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telah dilaksanakan untuk pemecahan masalah yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Moneter Awal Islam

Kebijakan moneter adalah alat Bank Indonesia yang dirancang untuk digunakan untuk mengendalikan variabel keuangan seperti suku bunga dan jumlah uang beredar. Sistem moneter Islam merupakan sistem ekonomi Islam yang mempunyai tujuan yang dapat dicapai, dalam uang islam, antara lain terwujudnya keadilan dan kemanfaatan.

Keselarasan antar sektor ekonomi moneter mempengaruhi seluruh sektor perekonomian. Bangkitnya lembaga keuangan syariah mempengaruhi keseimbangan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat. Dilihat dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) dan rekening bank syariah, terlihat pada Juli 2021, penerimaan DOK dari bank syariah mencapai Rp504 triliun dan dana yang disetor sebesar Rp405 triliun. Perkembangan real estate dan keuangan serta keuangan syariah akan semakin meningkat dan tumbuh secara eksponensial setiap tahunnya.

Sistem Moneter Konvensional

Pendekatan sistem ekonomi tradisional terhadap kebijakan moneter berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan moneter konvensional diukur dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah total pinjaman bank umum (LOAN) dan rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah (SUNO). Instrumen yang digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter dalam sistem moneter tradisional pada hakikatnya dirancang untuk mengendalikan uang yang beredar dimasyarakat, justru merupakan pemborosan. Pada saat yang sama, kebijakan moneter dalam sistem Islam tidak mengizinkan instrumen berbunga diamortisasi pasar. Kebijakan moneter Islam berfokus pada menjaga sirkulasi sumber daya keuangan. Jadi sederhananya, regulator harus memastikan ketersediaan perusahaan keuangan dan produk keuangan berbasis syariah yang mampu menjaring potensi investasi masyarakat.

Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional

Pertanyaan pertama berfokus pada kebijakan moneter, mekanisme kebijakan moneter, dan lebih khusus lagi, mekanisme menjalin hubungan positif dengan sektor riil perekonomian. Karena itu adalah bagian. Kebijakan moneter dapat dikatakan tidak mempengaruhi sektor riil perekonomian. Dengan kata lain, perekonomian berkembang dalam siklus penyesalan. Mekanisme transmisi merupakan saluran atau mekanisme yang menghubungkan kebijakan moneter dengan kebijakan ekonomi.

Para ekonom berpendapat bahwa uang memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja. Di sisi lain, Keynes berpendapat, ada variabel lain yang mempengaruhi hasil riil, misalnya belanja pemerintah. Saat ini, para ekonom sepakat dengan para pengambil keputusan bahwa kebijakan moneter mempunyai dampak yang signifikan terhadap sektor ini, setidaknya dalam jangka pendek, dan menekankan bahwa salah satu mekanisme transmisinya adalah saluran kredit. Pada dasarnya implementasi kebijakan moneter merupakan interaksi antar bank sentral. Lembaga keuangan dan pengelola keuangan lainnya, serta bank dan lembaga lainnya.

Pada perekonomian sektor riil lainnya. Interaksi ini terjadi dalam dua tahap proses pembubutan Keuangan. Pertama, interaksi bank sentral dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Kedua, interaksi terkait tindakan mediasi antara sektor perbankan dan lembaga serta operator keuangan lainnya dalam berbagai fungsi sektor riil.

Kebijakan Moneter pada Masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah, perekonomian arab bukanlah perekonomian terbelakang yang hanya mengenal pertukaran, bahkan tidak digambarkan demikian. Baik sebelum maupun sesudahnya, orang arab menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai moneter yang tetap, sehingga tidak ada masalah dengan peredaran uang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya dirham lebih sering digunakan dibandingkan dinar. Hal ini erat kaitannya dengan penaklukan hampir seluruh wilayah Kerajaan Persia oleh tentara Islam. Pada saat yang sama, tentara muslim tidak berhasil menguasai seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, kedua mata uang tersebut diperkenalkan, yaitu dinar Roma dan dinar Persia. Jumlah impor dinar dan dirham serta barang konsumsi bergantung pada ekspor kedua negara dan wilayah lain yang berada dibawah pengaruhnya. Pada masa Rasulullah telah terjadi : (1) Disemua lapisan masyarakat arab, bahkan alat pembayaran resmi mata uang asing Persia dan Romawi yang dikenal yaitu dinar dan dirham. (2) Sistem moneter bebas terbentuk, tidak ada hambatan dalam pengenalan dinar dan dirham. (3) Pembayaran tanpa uang tunai diterima dikalangan pedangan. (4) Cek dan wesel sering digunakan, misalnya Umar bin Khattab menggunakan alat ini untuk membawa barang baru dari Mesir ke Madinah. (5) Anjak piutang yang baru populer pada tahun 1980-an disebut hiwalah, namun bukan berarti uang.

Tujuan Kebijakan Moneter

Dalam mencapai atau menjamin kelancaran fungsi sistem moneter, lembaga keuangan pada umunya mengendalikan keseluruhan sistem. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor riil. Kebijakan moneter merupakan instrumen kebijakan publik yang penting dalam sistem perekonomian. Tujuan kebijakan moneter Islam adalah : (1) Kesejahteraan ekonomi dan peluang lapangan kerja penuh. (2) Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan. (3) Stabilitas nilai uang.

Prinsip Kebijakan Moneter

Menurut Wahyudi (2013), kebijakan moneter didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu: (1) Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang absolut. (2) Manusia merupakan pemimpin di bumi, tetapi bukan pemilik sebenarnya. (3) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung: (a) Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. (b) Kekayaan harus diputar. (c) Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antara golongan. (d) Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Terdapat empat instrumen yang digunakan untuk mengatur uang yang beredar, yaitu: (a) Operasi pasar terbuka (*open market operation*). (b) Fasilitas diskonto (*discounto rate*). (c) Rasio cadangan wajib (*reserve requitment ratio*). (d) Imbauan moral (*moral persuasion*).

KESIMPULAN

Selama bertahun-tahun, sistem keuangan telah mengalami banyak perkembangan, dan sistem keuangan ini telah menjadi subjek penelitian yang cermat dan penelitian sebelumnya di bidang perekonomian lainnya. Sistem keuangan pada masa Rasulullah SAW menggunakan dua standar: emas dan perak (dirham dan dinar) karena merupakan dua alat pembayaran dan distribusi yang sah dalam masyarakat. 32 Sebelum Masa Keemasan Islam, pemerintahan Quraisy mempunyai sistem dan kebijakan moneter, meskipun lebih fleksibel. Kemudian, ketika Khalifah Umar memerintah Islam antara tahun 634 hingga 644 M. C., pada masa itu banyak terjadi perubahan. Beberapa kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar dalam mengelola sektor keuangan adalah: (1) Islam mengharamkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan daya beli dan ketidakstabilan nilai uang. Misalnya: setiap orang Kegiatan yang tidak menguntungkan yaitu penebusan dosa. hujan. Penyimpanan dilarang. benih Memantau inflasi dan mengatasi dampaknya. (2) Hindari penipuan dan uang palsu. (3) Mengendalikan inflasi dengan mendorong masyarakat untuk berinvestasi, mengekang pengeluaran, dan mengekang eksekusi dan pemborosan. (4) Penggabungan uang dengan tulisan dirham atau 6 dinar, menurut hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E. P., Rahmandani, N., & Rusgianto, S. (2023). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Inflasi di Negara OKI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 73-86.
- Dwihapsari, R., Kurniawati, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 980-993.
- Hubara, Z. A., Nurrahma, S. A., & Jannah, N. (2021). Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS TRIANGLE*, 2(4), 463-474.
- Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144-154.
- Suaidi, S. (2023). Studi Perbandingan Sistem Moneter Keuangan Syariah Dengan Sistem Konvensional. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 2517-2528.